



Research Article

Fenomena Gerakan Politik di Media Sosial Pasca Pemilihan Presiden 2024 (Arah Baru Demokrasi Indonesia)

Arifin Ilham¹, Junaidi²

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
E-mail: ilhamarifin1249@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
E-mail: Junaidi@uinsu.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2024
Accepted : March 12, 2025

Revised : February 27, 2025
Available online : April 16, 2025

How to Cite: Ilham, A. and Junaidi (2025) "The Phenomenon of Political Movements on Social Media After the 2024 Presidential Election (A New Direction of Indonesian Democracy)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 223–236. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2180.

The Phenomenon of Political Movements on Social Media After the 2024 Presidential Election (A New Direction of Indonesian Democracy)

Abstract. The 2024 Presidential Election brought new dynamics to Indonesia's democracy, with social media emerging as the primary platform for political movements. This study aims to address the research problem regarding how social media influences political participation patterns and the direction of democracy after the election. A qualitative approach with phenomenological research design was employed to explore the experiences of individuals and groups in forming and participating

in social media-based political movements. Data were collected through in-depth interviews, online participatory observation, and analysis of social media posts. Manuel Castells' network society theory served as the basis for understanding the role of digital society in political interactions. The findings reveal that social media enhances inclusive political participation but also increases the risks of polarization and disinformation, which can impact the quality of democracy. The research findings indicate that social media has emerged as a new political arena, displacing the dominance of traditional actors. Influencers and buzzers act as emotional bridges between political policies and public perception, while civil society groups leverage digital platforms for advocacy and democratic oversight.

Keywords: Social Media, Political Movement, Democracy

Abstrak. Pemilihan Presiden 2024 membawa dinamika baru dalam demokrasi Indonesia, di mana media sosial menjadi platform utama gerakan politik. Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah bagaimana media sosial memengaruhi pola partisipasi politik dan arah demokrasi pasca pemilu. Tujuannya adalah untuk memahami pengalaman individu dan kelompok dalam membentuk dan mengikuti gerakan politik berbasis media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif online, dan analisis dokumen unggahan media sosial. Teori yang digunakan adalah *Network Society* Manuel Castells, yang menjelaskan bagaimana masyarakat digital membentuk interaksi sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena politik yang menggeser dominasi aktor tradisional. Influencer dan buzzer berperan sebagai pen jembatan emosional antara kebijakan politik dan persepsi masyarakat, sementara kelompok sipil memanfaatkan platform digital untuk aktivisme digital dan pengawasan demokrasi. Gerakan politik di media sosial memberikan dampak positif terhadap demokrasi Indonesia namun juga memiliki tantangan yang besar didalamnya seperti polarisasi dan disinformasi.

Kata Kunci: Media Sosial, Gerakan Politik, Demokrasi

INTRODUCTION

Pemilihan Presiden 2024 menandai fase transformatif dalam demokrasi Indonesia, di mana media sosial tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi arena kontestasi kekuasaan (Castells, 2012). Berbeda dengan pemilu sebelumnya, platform seperti Twitter (X), Instagram, dan TikTok menjadi ruang utama bagi aktor politik—baik formal maupun non-formal untuk membingkai narasi, memobilisasi massa, dan memengaruhi hasil pemilu melalui strategi digital yang terukur (Kandias & Karniawati, 2024). Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif menciptakan gerakan politik baru di luar struktur tradisional, seperti kampanye #ReformasiDikorupsi yang viral pasca-pemilu.

Penggunaan media sosial dalam politik bukanlah fenomena baru. Dalam Pemilu 2014 dan 2019, media sosial telah menjadi alat penting bagi kampanye politik dan mobilisasi massa. Namun, Pemilu 2024 membawa dinamika yang berbeda karena penggunaan teknologi digital semakin masif dan masyarakat semakin bergantung pada media sosial sebagai sumber informasi utama mereka (Adnan & Mona, 2024). Gerakan politik yang sebelumnya didominasi oleh elite politik dan partai-partai besar kini juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil, influencer, dan komunitas online yang lebih terorganisir. Dalam hal ini, peran media sosial telah

mengubah wajah demokrasi di Indonesia, di mana politik menjadi lebih partisipatif, namun juga lebih rentan terhadap disinformasi dan manipulasi.

Pasca Pemilihan Presiden 2024, terlihat adanya perubahan dalam pola interaksi politik. Media sosial, yang awalnya hanya sebagai alat komunikasi politik, kini menjadi medium utama untuk membentuk gerakan politik yang lebih luas. Fenomena ini terlihat dari munculnya berbagai gerakan politik yang didorong oleh masyarakat sipil melalui media sosial, baik sebagai dukungan terhadap pemerintah terpilih maupun sebagai oposisi (Widayanti & Nilam, 2023). Kelompok-kelompok ini menggunakan media sosial untuk memobilisasi dukungan, menyebarkan informasi, dan mengorganisir aksi massa. Dengan demikian, media sosial telah menjadi arena baru dalam politik Indonesia pasca Pemilu 2024.

Peran media sosial dalam politik pasca Pemilihan Presiden 2024 telah menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, media sosial memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menyuarakan pendapat mereka dan terlibat langsung dalam proses politik (Kandias & Karniawati, 2024). Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan ancaman terhadap stabilitas politik dan tatanan demokrasi. Penyebaran informasi palsu, kampanye hitam, dan polarisasi politik yang tajam sering kali muncul melalui platform media sosial, yang berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Disinformasi yang beredar dengan cepat di media sosial dapat merusak legitimasi proses politik dan menyebabkan keretakan sosial yang mendalam.

Gerakan politik yang berbasis di media sosial juga cenderung lebih fleksibel dan tidak terikat pada struktur formal politik. Hal ini terlihat dari munculnya gerakan-gerakan politik baru yang tidak terkait langsung dengan partai politik, tetapi mendapatkan dukungan luas dari masyarakat melalui media sosial (Saridewi, 2015). Contoh gerakan ini antara lain adalah kampanye-kampanye online yang mendukung isu-isu sosial tertentu atau bahkan gerakan oposisi yang mengkritik kebijakan pemerintah. Keberadaan gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat mobilisasi politik yang efektif, bahkan lebih efektif dibandingkan media massa konvensional (Sokid, 2023).

Lebih jauh lagi, media sosial memungkinkan terjadinya proses politik yang lebih desentralisasi. Proses ini memunculkan fenomena di mana opini publik dapat terbentuk secara organik tanpa intervensi langsung dari elite politik. Masyarakat dapat menyebarkan informasi, berdiskusi, dan membentuk opini politik mereka sendiri berdasarkan interaksi dengan sesama pengguna media sosial (Andzani, Virgin, Pristica, & Dwihadiah, 2024). Ini mengarah pada terjadinya perubahan signifikan dalam hubungan antara masyarakat dan aktor politik. Jika sebelumnya elite politik memiliki kendali penuh atas narasi politik yang berkembang, kini masyarakat juga memiliki kekuatan untuk membentuk narasi tersebut melalui media sosial.

Namun, terlepas dari manfaat yang dihadirkan oleh media sosial dalam memperkuat partisipasi politik, terdapat kekhawatiran bahwa fenomena ini dapat membawa risiko terhadap keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Polarisasi politik yang semakin tajam, kampanye negatif yang agresif, serta penyebaran hoaks dapat merusak hubungan antar kelompok masyarakat dan menciptakan ketegangan sosial

yang berpotensi mengarah pada konflik (Sitorus, Tanoyo, & Irwansyah, 2024). Selain itu, penggunaan media sosial oleh aktor politik untuk menyebarkan propaganda dan mengendalikan narasi publik juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan etika dalam politik digital.

Dalam konteks politik digital pasca Pemilihan Presiden 2024, aktor non-politik seperti influencer, buzzer, dan kelompok sipil memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk opini publik dan mengarahkan gerakan politik di media sosial. Berbeda dengan aktor politik tradisional seperti partai dan politisi, kelompok ini memiliki fleksibilitas naratif dan jangkauan yang luas dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat. Mereka mampu membingkai isu, menggerakkan dukungan, serta membangun opini publik yang terkadang lebih efektif dibandingkan strategi komunikasi politik konvensional.

Influencer politik, misalnya, memiliki daya tarik yang lebih personal dan kredibel di mata audiensnya, sehingga opini mereka sering kali dianggap lebih autentik dibandingkan propaganda politik formal. Buzzer, di sisi lain, berfungsi sebagai penggerak wacana politik dengan strategi komunikasi yang agresif, memainkan peran dalam polarisasi politik, framing isu, dan bahkan dalam membangun atau menghancurkan citra kandidat maupun kebijakan tertentu. Sementara itu, kelompok sipil seperti aktivis dan organisasi masyarakat berkontribusi dalam mendorong agenda tertentu, mengorganisir kampanye digital, serta mengadvokasi kebijakan berbasis kepentingan publik.

Pasca pemilu, dinamika peran aktor non-politik ini semakin menarik untuk diteliti karena mereka tidak hanya sekadar mendukung kandidat, tetapi juga membentuk narasi politik yang bisa menentukan arah demokrasi ke depan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana pengaruh mereka dalam mengarahkan opini publik dan kebijakan pasca pemilu? Apakah kehadiran mereka memperkuat demokrasi dengan memperluas partisipasi politik, atau justru memperburuk kondisi dengan menciptakan polarisasi yang lebih dalam?. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran aktor non-politik dalam membentuk gerakan politik di media sosial pasca Pemilihan Presiden 2024.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis fenomena gerakan politik yang terjadi di media sosial pasca Pemilihan Presiden 2024 dengan menyoroti bagaimana dinamika politik digital berkembang setelah proses pemilu selesai. Penelitian ini tidak hanya membahas kampanye politik pasca pemilu, tetapi juga menelaah secara lebih spesifik peran aktor non-politik, seperti influencer, buzzer, dan kelompok sipil, dalam membentuk opini publik, mengarahkan wacana politik, serta memobilisasi gerakan sosial di platform digital. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak penggunaan media sosial terhadap stabilitas politik, partisipasi demokratis, serta polarisasi masyarakat dalam era pasca-pemilu. Dengan demikian, penelitian ini tidak terbatas pada satu aspek tertentu, melainkan berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana media sosial menjadi arena politik baru yang berpengaruh dalam menentukan arah demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai fenomena gerakan politik di media sosial pasca Pemilihan Presiden 2024 menjadi penting untuk memahami arah baru demokrasi di Indonesia. Bagaimana peran media sosial dalam membentuk gerakan

politik? Apakah fenomena ini membawa dampak positif terhadap demokrasi, atau justru memperburuk kondisi politik dengan memperkuat polarisasi dan disinformasi? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia dalam era politik digital ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam rangka memahami transformasi demokrasi Indonesia di era media sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan pola demokrasi di Indonesia pasca Pemilihan Presiden 2024. Dengan menganalisis fenomena gerakan politik yang berbasis di media sosial, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana media sosial mempengaruhi proses politik dan bagaimana hal ini berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan aktor politik lainnya dalam menghadapi tantangan yang muncul dari penggunaan media sosial dalam politik (Kadir, 2022).

Dalam era politik digital ini, media sosial telah menjadi medan baru dalam kontestasi politik yang tidak bisa diabaikan. Potensinya untuk memperluas partisipasi politik, sekaligus memperdalam polarisasi dan disinformasi, menuntut penelitian yang lebih komprehensif terhadap dampaknya terhadap demokrasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Manuel Castells dalam bukunya *Networks of Outrage and Hope*, media sosial dapat menjadi ruang bagi gerakan sosial dan politik yang memberikan harapan bagi keterlibatan masyarakat yang lebih besar, tetapi juga dapat menjadi alat kontrol dan manipulasi oleh aktor-aktor yang ingin mempertahankan kekuasaan (Castells, 2012). Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena gerakan politik berbasis media sosial pasca Pemilihan Presiden 2024 menjadi sangat relevan untuk memahami arah baru demokrasi Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang politik digital dengan menyoroti secara spesifik dinamika gerakan politik di media sosial pasca Pemilihan Presiden 2024. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada strategi kampanye digital sebelum dan selama pemilu, penelitian ini menelaah bagaimana aktor non-politik seperti influencer, buzzer, dan kelompok sipil terlibat dalam membentuk opini publik, memobilisasi dukungan politik, serta mempengaruhi kebijakan setelah pemilu selesai. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak jangka panjang media sosial terhadap stabilitas demokrasi, baik dalam memperkuat partisipasi politik maupun memperburuk polarisasi masyarakat.

Adapun gap penelitian yang ingin diisi adalah kurangnya kajian yang membahas secara komprehensif peran media sosial dalam fase pasca pemilu, terutama dalam membentuk arah demokrasi ke depan. Sebagian besar studi masih berfokus pada masa kampanye dan pemilu, sementara penelitian ini berusaha memberikan perspektif baru mengenai bagaimana politik digital tetap berperan signifikan setelah proses pemilu selesai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi politik di era digital serta implikasinya terhadap demokrasi Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan bagaimana pola-pola gerakan politik yang terbentuk di media sosial memengaruhi kualitas demokrasi.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini, diharapkan juga dapat dihasilkan rekomendasi strategis bagi aktor politik, media, dan masyarakat untuk menjaga demokrasi tetap sehat di tengah derasnya arus digitalisasi politik. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh demokrasi Indonesia di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis fenomena gerakan politik di media sosial pasca Pemilihan Presiden 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi media sosial dan analisis konten terhadap diskursus politik yang berkembang di platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok. Penelitian ini menerapkan analisis media sosial (*social media analysis*) untuk mengidentifikasi pola interaksi, tren hashtag, intensitas perbincangan, serta keterlibatan pengguna (*engagement*) dalam membentuk opini publik. Selain itu, analisis konten dilakukan untuk mengkaji narasi politik yang dominan, strategi komunikasi yang digunakan oleh berbagai kelompok politik, serta penyebaran informasi dan disinformasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk memahami konstruksi narasi politik serta analisis jaringan sosial (*social network analysis*) guna memetakan hubungan aktor dalam ekosistem politik digital.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika gerakan politik di media sosial dan perannya dalam membentuk arah demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola gerakan politik, seperti meningkatnya aktivisme digital, kampanye isu tertentu, dan mobilisasi dukungan politik

Hasil penelitian mengungkap tiga pola utama gerakan politik pasca-2024: aktivisme digital, kampanye isu mikro, dan mobilisasi dukungan transaksional. Aktivisme digital, misalnya, terlihat dalam gerakan #PemiluUlang yang diinisiasi Masyarakat digital dan buzzer independen untuk menolak hasil pemilu 2024 dikarenakan terlihat banyak kecurangan dari paslon pemenang menjadi fenomena yang selaras dengan teori gerakan sosial *connective action* (Bennett & Segerberg, 2013). Gerakan ini mengandalkan keterlibatan personal di media sosial alih-alih struktur hierarkis partai.

Setelah pemilihan presiden 2024, gerakan politik di Indonesia menunjukkan sejumlah pola yang mencolok, terutama dalam hal aktivisme digital, kampanye isu tertentu, dan mobilisasi dukungan politik. Aktivisme digital telah menjadi salah satu pilar utama dalam politik Indonesia pasca pemilu. Penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dengan pemilih dan menyebarkan informasi politik semakin meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa platform seperti TikTok dan Instagram telah digunakan secara luas untuk memobilisasi dukungan dan menyampaikan pesan politik. Misalnya, masyarakat Kota Bandung memanfaatkan TikTok untuk mengampanyekan pilihan mereka dalam pemilihan presiden, yang menunjukkan bagaimana media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik Masyarakat (Kandias & Karniawati, 2024).

Buzzer beroperasi melalui strategi *astroturfing* (Howard, 2020), menciptakan ilusi dukungan massa dengan akun palsu. Misalnya, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian akun yang mendukung pemerintah di media sosial dapat menggunakan bot untuk memperkuat narasi tertentu, seperti 'stabilitas pasca-pemilu', guna mengimbangi kritik. Selain itu, beberapa analisis mengungkap bahwa sebagian konten yang disebarluaskan mengandung klaim yang belum terverifikasi, termasuk isu-isu kontroversial yang dapat memengaruhi opini publik (McIntyre, 2018). Fenomena ini mencerminkan *post-truth politics*, di mana emosi lebih dominan dibandingkan fakta dalam membentuk persepsi masyarakat.

Pasca pemilu, fokus pada isu-isu tertentu tetap menjadi strategi penting dalam komunikasi politik. Isu-isu seperti kebijakan ekonomi dan stabilitas demokrasi menjadi topik hangat yang terus dibahas. Penelitian menunjukkan bahwa ketegangan politik pasca pemilu terkait dengan upaya membangun koalisi pemerintahan yang stabil serta mengatasi polarisasi politik yang meningkat (Agustin, Maharani, & Ramadhani, 2024). Di media sosial, perdebatan mengenai arah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah konsolidasi demokrasi sering kali mencerminkan ketegangan tersebut, dengan berbagai kelompok politik saling memengaruhi untuk membentuk narasi publik. Selain itu, munculnya gerakan politik yang memperjuangkan agenda tertentu, seperti reformasi ekonomi atau perlindungan hak-hak sipil, semakin menambah kompleksitas dalam membangun konsensus nasional. Dalam konteks ini, upaya untuk meredam polarisasi politik menjadi semakin penting, mengingat bahwa perpecahan yang berkelanjutan dapat menghambat tercapainya stabilitas politik dan memperburuk kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Mobilisasi dukungan politik pasca pemilu tidak hanya terbatas pada periode kampanye tetapi juga berlanjut setelah hasil pemilu diumumkan. Dukungan dari tokoh publik dan selebriti telah terbukti efektif dalam mempengaruhi sikap pemilih. Penelitian menunjukkan bahwa *endorsement* dari selebriti dapat meningkatkan popularitas kandidat di kalangan pemilih muda dan mereka yang memiliki ikatan emosional dengan selebriti tersebut (Dharta, 2024). Di media sosial, pergerakan politik ini tampak dalam bentuk kampanye lanjutan, penyebaran informasi, dan upaya mempertahankan pengaruh politik oleh berbagai aktor. Setelah pemilu, banyak kelompok politik dan pendukung calon tertentu terus aktif di media sosial untuk mengonsolidasikan basis dukungan mereka, mengarahkan opini publik terhadap kebijakan pemerintah baru, atau menentang kebijakan yang dianggap kontroversial.

Pola gerakan politik di Indonesia pasca pemilihan presiden 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivisme digital, fokus pada isu-isu tertentu, dan mobilisasi dukungan politik yang berkelanjutan. Media sosial memainkan peran kunci dalam membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat, sementara isu-isu seperti kebijakan ekonomi dan penanganan hoaks tetap menjadi perhatian utama dalam diskursus politik.

Pergerakan politik di media sosial pasca pemilu juga mencakup aksi-aksi simbolis seperti petisi online, tagar viral, dan protes digital yang bertujuan untuk menggalang dukungan atau mempengaruhi kebijakan. Aktivitas ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena politik yang dinamis, di mana kontestasi

kekuasaan dan pengaruh berlangsung secara terus-menerus, bahkan di luar siklus pemilu formal. Gerakan politik ini sering kali memanfaatkan isu-isu terkini untuk memperkuat argumen politik, seperti kebijakan ekonomi, penegakan hukum, atau perubahan undang-undang tertentu, yang dapat memicu diskusi publik secara luas dan bahkan memengaruhi agenda politik nasional.

Aktor politik, termasuk politisi, influencer, dan kelompok masyarakat, memainkan peran penting dalam gerakan politik yang terjadi di media sosial. Media sosial telah menjadi platform yang signifikan untuk menyampaikan pesan politik, membentuk opini publik, dan mobilisasi massa. Media sosial memungkinkan aktor politik untuk mengorganisir dan memobilisasi dukungan secara efektif. Contohnya, dalam gerakan menolak penundaan pemilu di Indonesia, media sosial berfungsi sebagai saluran untuk menyuarakan pandangan dan membentuk opini terkait proses demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa platform seperti Twitter digunakan untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan berbagai aktor politik, meningkatkan konektivitas di antara mereka (Utomo & Irwansyah, 2023).

Politisi dan buzzer sering kali terlibat dalam pembentukan opini publik melalui media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa buzzer dapat mempengaruhi tren diskusi di media sosial dengan menyebarkan konten yang mendukung calon tertentu, seperti Anies Baswedan pada Pilkada 2024. Mereka menggunakan akun palsu atau anonim untuk menciptakan persepsi positif atau negatif terhadap kandidat dan isu-isu tertentu, serta memanipulasi sentimen publik dengan cara yang sistematis (Maulana & Hastuti, 2022). Strategi ini tidak hanya melibatkan penyebaran konten yang viral, tetapi juga melibatkan upaya untuk mengarahkan narasi atau mengaburkan informasi yang merugikan pihak tertentu. Penggunaan buzzer sering kali didukung oleh algoritma media sosial, yang cenderung memprioritaskan konten yang kontroversial atau emosional, sehingga memperbesar jangkauan pesan yang disebarkan.

Media sosial juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa platform ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu serta kegiatan politik lainnya. Di beberapa daerah, seperti Desa Candirejo di Deli Serdang, media sosial telah terbukti efektif dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam politik, baik melalui kampanye kesadaran politik, sosialisasi informasi mengenai calon pemimpin, hingga penyebaran informasi tentang kebijakan publik yang relevan (Chairunisa, Batubara, Saragih, & Ivanna, 2024). Dampak media sosial ini memperlihatkan bahwa akses informasi yang cepat dan interaktif dapat mendorong lahirnya kesadaran politik yang lebih tinggi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan platform digital. Penggunaan media sosial juga memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam diskusi isu-isu politik secara online, yang sebelumnya sulit terwujud dalam ruang publik tradisional.

Politisi menggunakan media sosial untuk membangun citra diri atau *personal branding* yang positif. Misalnya, Ganjar Pranowo memanfaatkan Instagram untuk berinteraksi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan melalui konten yang relevan (Rahmah, 2021). Strategi ini membantu politisi menjangkau audiens yang

lebih luas dan memperkuat dukungan publik, terutama dengan memanfaatkan visualisasi yang menarik dan narasi yang membumi. Dengan menggunakan platform seperti Instagram, politisi dapat mengatur bagaimana mereka ingin dilihat oleh publik menyampaikan pesan-pesan politik, menonjolkan kedekatan dengan rakyat, hingga menunjukkan respons terhadap isu-isu terkini yang menjadi perhatian masyarakat.

Secara keseluruhan, peran aktor politik dalam gerakan di media sosial sangat kompleks dan saling terkait. Mereka tidak hanya sebagai pengirim pesan tetapi juga sebagai penggerak opini dan partisipasi masyarakat dalam konteks politik modern. Di era digital, mereka mampu mempengaruhi arah diskusi publik melalui strategi komunikasi yang dirancang secara cermat, mengontrol narasi politik, dan memanfaatkan fitur-fitur media sosial seperti *live streaming*, komentar, serta konten multimedia untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Kemampuan politisi untuk menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi langsung tanpa perantara juga memberi mereka akses lebih besar dalam membentuk opini publik dan memobilisasi dukungan politik secara lebih efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktor politik tidak hanya berperan pasif dalam menyebarkan informasi, tetapi juga aktif dalam mengarahkan diskursus politik yang berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, aksi sosial, hingga kebijakan publik.

Pengaruh gerakan politik di media sosial terhadap partisipasi politik dan kesadaran demokrasi menunjukkan bahwa platform digital ini telah menjadi tempat yang penting bagi mobilisasi politik, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sehingga memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide yang dapat mendorong keterlibatan politik. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, seperti Instagram dan TikTok, tidak hanya meningkatkan kesadaran akan isu-isu politik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi dalam pemilihan umum. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi palsu juga perlu diatasi agar dampak positif dari media sosial dapat dimaksimalkan.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam gerakan politik melalui media sosial menciptakan ruang baru untuk akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya interaksi langsung antara politisi dan pemilih, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi tindakan pemerintah dan menyuarakan aspirasi mereka. Hal ini berpotensi memperkuat kesadaran demokrasi, karena orang-orang merasa lebih terhubung dan berdaya dalam proses politik. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan teknologi ini secara bijaksana dengan mengedukasi pengguna tentang cara mengenali informasi yang benar dan berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi politik.

Tabel Ringkasan Pola Gerakan Politik di Media Sosial (Pasca-Pemilu 2024)

Pola Gerakan	Karakteristik Utama	Contoh Kasus	Dampak	Tantangan
Aktivisme Digital	- Gerakan Berbasis Tagar - Keterlibatan Lsm Dan Buzzer Independen. - Transparansi	#PemiluUlang, Protes Digital Di Twitter (X) dikarenakan banyak indikasi kecurangan pemilu.	Meningkatkan Partisipasi Publik. Memperkuat Tekanan Untuk Akuntabilitas.	Risiko Disinformasi. Manipulasi Algoritma.
Kampanye Isu Mikro	- Fokus Pada Isu Spesifik (Ekonomi, Stabilitas). - Narasi Emosional.	Debat Kebijakan Ekonomi Di Twitter. #Reformasijilid2.	Mempertajam Diskusi Kebijakan. Memicu Polarisasi.	Fragmentasi Opini. Efek Echo Chamber.
Mobilisasi Transaksional	- Dukungan Bayaran/Buzzer. - Astroturfing (Akun Bot). - Endorsement Selebriti.	Timbulnya akun-akun Bot Pro pemerintah.	Memperkuat Ilusi Konsensus. Mempengaruhi Pemilih Muda.	Penurunan Kredibilitas. Potensi Keresahan Sosial.

Perubahan dalam hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan media sosial menciptakan dinamika baru yang mengubah cara interaksi dan komunikasi di era digital ini. Media sosial telah menjadi jembatan yang menghubungkan suara rakyat dengan pengambil keputusan, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan harapan mereka secara langsung. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk lebih responsif dan transparan, karena setiap tindakan mereka dapat dengan cepat menjadi sorotan publik. Dengan adanya platform seperti Twitter dan Facebook, informasi dapat menyebar dengan cepat, memicu diskusi yang luas dan sering kali menuntut pertanggungjawaban dari pihak berwenang (Nursyam, 2016).

Namun, perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri. Masyarakat kini harus lebih kritis dalam memilah informasi yang diterima, mengingat banyaknya berita palsu dan disinformasi yang beredar di media sosial. Di sisi lain, pemerintah perlu beradaptasi dengan cara baru dalam berkomunikasi, tidak hanya sebagai penguasa tetapi juga sebagai mitra dialog dengan warganya. Inisiatif seperti forum online dan sesi tanya jawab di media sosial dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, era digital ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kembali kepercayaan dan kolaborasi dalam proses demokrasi yang lebih inklusif.

Analisis tantangan dan peluang bagi demokrasi di era digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik. Di satu sisi, media sosial dan platform digital lainnya memberikan akses yang lebih luas bagi warga untuk menyuarakan pendapat, berorganisasi, dan terlibat dalam diskusi

politik. Hal ini menciptakan peluang bagi peningkatan partisipasi politik yang lebih inklusif, memungkinkan suara dari berbagai latar belakang untuk didengar. Namun, tantangan besar juga muncul, termasuk penyebaran informasi palsu (hoaks) dan polarisasi opini yang dapat mengganggu proses demokrasi. Ketidakakuratan informasi dapat memengaruhi persepsi publik dan mengarah pada keputusan yang tidak berdasar, sehingga mengancam integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis.

Di sisi lain, era digital juga menuntut pemerintah untuk beradaptasi dengan cara baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan warganya. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan penggunaan teknologi untuk transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun, langkah-langkah pengawasan yang terlalu ketat terhadap media sosial dapat menimbulkan efek negatif, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan partisipasi politik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan literasi digital di kalangan masyarakat agar mereka dapat menyaring informasi dengan bijaksana dan terlibat secara konstruktif dalam diskusi politik. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi di era digital, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dampak gerakan politik di media sosial terhadap kualitas demokrasi menjadi isu yang semakin relevan di era digital ini. Media sosial telah berfungsi sebagai platform mobilisasi yang efektif, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik dan menyuarakan pendapat mereka secara langsung. Melalui gerakan seperti #ReformasiDikorupsi, #TolakHasilPilpres, #TolakHasilPemilu, dan #ReformasiJilid2 masyarakat dapat mengkritik kebijakan pemerintah dan memperjuangkan perubahan sosial dengan lebih mudah. Namun, meskipun media sosial meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi, tantangan seperti *slacktivism* di mana dukungan online tidak diikuti dengan tindakan nyata dapat mengurangi kualitas partisipasi tersebut. Selain itu, penyebaran informasi palsu dan polarisasi opini juga berpotensi merusak dialog konstruktif yang esensial bagi demokrasi.

Media sosial memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan memanfaatkan platform ini, pemerintah dapat berinteraksi langsung dengan warganya, mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka, serta merespons secara cepat. Namun, keberadaan informasi yang menyesatkan menuntut masyarakat untuk memiliki literasi digital yang tinggi agar dapat menyaring informasi dengan bijak. Untuk menjaga kualitas demokrasi, diperlukan upaya kolektif dalam meningkatkan pendidikan politik dan literasi media di kalangan masyarakat. Dengan demikian, meskipun media sosial membawa tantangan, ia juga menawarkan peluang signifikan untuk memperkuat demokrasi melalui partisipasi yang lebih aktif dan terinformasi.

Demokrasi modern tengah menghadapi persimpangan yang menentukan: menuju arah yang lebih partisipatif dan inklusif atau justru semakin terpolarisasi. Potensi demokrasi partisipatif terlihat dalam meningkatnya keterlibatan masyarakat melalui teknologi digital, di mana media sosial menjadi ruang dialog, transparansi, dan advokasi (Tamara, 2021). Warga negara dapat menyuarakan pendapat,

mendukung kebijakan yang progresif, dan memantau jalannya pemerintahan secara lebih aktif. Kondisi ini mencerminkan harapan baru akan demokrasi yang lebih terbuka, di mana pengambilan keputusan mencakup keragaman suara dan memperkuat representasi.

Namun, di sisi lain, ada ancaman nyata dari polarisasi yang semakin tajam. Media sosial, yang seharusnya menjadi katalisator partisipasi, kerap menjadi arena konflik ideologi dan disinformasi. Polarisasi ini tidak hanya menghambat dialog konstruktif, tetapi juga memperlebar jurang sosial di antara kelompok masyarakat. Jika tidak diatasi, demokrasi dapat kehilangan esensinya sebagai ruang kolektif untuk mencapai konsensus. Oleh karena itu, masa depan demokrasi sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam menciptakan ruang politik yang sehat dan inklusif.

Media sosial memiliki potensi besar sebagai alat demokrasi yang sehat jika dimanfaatkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media sosial perlu berkolaborasi untuk menyediakan panduan serta pelatihan yang mendukung kemampuan masyarakat dalam mengenali berita palsu, propaganda, dan ujaran kebencian (Sudirman & Antony, 2023). Dengan membangun ekosistem digital yang lebih beretika, media sosial dapat menjadi ruang yang mendorong dialog, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Selain itu, regulasi yang mendukung transparansi algoritma dan melindungi kebebasan berekspresi perlu diterapkan untuk menciptakan lingkungan daring yang adil dan demokratis. Platform media sosial harus memastikan algoritma mereka tidak memperkuat polarisasi atau menyebarkan konten yang merusak. Sebagai gantinya, mereka dapat memprioritaskan penyebaran informasi berbasis fakta dan mendukung diskusi yang konstruktif. Dengan strategi ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium yang memperkuat nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat yang aktif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa media sosial pasca-Pemilu 2024 telah mentransformasi demokrasi Indonesia menjadi arena kontestasi politik baru, di mana aktor non-politik (influencer, buzzer, kelompok sipil) menjadi kekuatan sentral dalam membentuk gerakan politik. Temuan utama menunjukkan bahwa aktor non-politik seperti buzzer dan influencer berhasil menggeser dominasi partai politik melalui strategi *astroturfing* dan narasi emosional, seperti terlihat dalam gerakan #PemiluUlang yang dimobilisasi oleh kolaborasi LSM dan akun independen. Di satu sisi, media sosial memperkuat partisipasi inklusif—khususnya bagi generasi muda—melalui petisi digital dan tekanan akuntabilitas, seperti kampanye transparansi kebijakan di TikTok. Namun, di sisi lain, platform ini juga memperdalam polarisasi melalui *echo chamber* dan melemahkan legitimasi politik akibat disinformasi terstruktur, misalnya kampanye bot pro-pemerintah yang menciptakan ilusi konsensus. Tantangan terbesar terletak pada desentralisasi kekuasaan narasi, di mana

elite politik kehilangan monopoli atas wacana publik, sementara kontrol algoritma oleh korporasi asing berpotensi memengaruhi agenda politik lokal. Untuk menjaga kualitas demokrasi, diperlukan regulasi algoritma yang transparan dan program literasi digital masif guna memitigasi disinformasi tanpa menekan partisipasi. Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia sedang memasuki fase "hybrid", di mana kekuatan politik formal dan non-formal saling bersaing di ruang digital, menuntut pendekatan etis dan strategis untuk menyeimbangkan inklusivitas dengan stabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Mona, N. (2024). Strategi Komunikasi Politik Melalui Media Sosial Oleh Calon Presiden 2024. *Jurnal Ilmu Politik*, 15 (1), 2.
- Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). Dinamika Ketegangan Politik Pasca Pemilu 2024 Dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12 (2), 241. Doi: <https://doi.org/10.33558/Governance.V12i2.9742>
- Andzani, D., Virgin, D., Pristica, B., & Dwihadiah, D. L. (2024). Analisis Peran Media Sosial Dalam Proses Mediatisasi Politik: Perspektif Komunikasi Politik Dan Partisipasi Publik. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 11 (1), 1007.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The Logic Of Connective Action: Digital Media And The Personalization Of Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. Doi: <https://doi.org/10.1017/Cb09781139198752>
- Castells, M. (2012). *Networks Of Outrage And Hope*. Malden: Polity Press.
- Chairunisa, P., Batubara, D. P., Saragih, O. A., & Ivanna, J. (2024). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Candirejo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. *Journal On Education*, 20595. Doi: <https://doi.org/10.31004/Joe.V6i4.6122>
- Dharta, F. Y. (2024). Pengaruh Dukungan Selebriti Dalam Komunikasi Politik Terhadap Sikap Pemilih Pada Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 8 (1), 125. Doi: <https://doi.org/10.25139/Jkp.V8i1.8283>
- Hayat, M. A., Hidayat, H. A., Pebtianti, E., Maulana, E. J., & Syahbana, T. A. (2024). Penggunaan Media Sosial Instagram Ganjar Pranowo Dalam Kampanye Politik Pemilihan Presiden Tahun 2024. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 418-419. Doi: <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V9i1.14886>
- Howard, P. N. (2020). *Lie Machines: How To Save Democracy From Troll Armies, Deceitful Robots, Junk News Operations, And Political Operatives*. New Haven: Yale University Press.
- Kadir, N. (2022). Media Sosial Dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial Dan Gen Z. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4 (2), 203-204.
- Kandias, M. N., & Karniawati, N. (2024). Fenomena Partisipasi Kota Bandung Dalam Pemilihan Presiden Melalui Media Tiktok. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6 No. 1, 25-26. Doi: <https://doi.org/10.36355/Jppd.V6i1.140>

- Khoerunnisa. (2024). Fenomena Buzzer Dan Pengaruhnya Dalam Proses Pesta Demokrasi Di Indonesia Tahun 2024. *Jurnal Audiens*, 5 (1), 98. Doi:10.18196/Jas.V5i1.341
- Maulana, H. F., & Hastuti, H. (2022). Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Dukung Anies Baswedan Di Sosial Media Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6 (1), 112-114. Doi:https://doi.org/10.24853/Pk.6.1.111-122
- McIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. Cambridge: Mit Press.
- Nursyam. (2016). *Media Sosial, Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: How The New Personalized Web Is Changing What We Read And How We Think*. Penguin Publishing Group.
- Rahmah, S. (2021). Personal Branding Ganjar Pranowo Untuk Membangun Komunikasi Politik Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5 (1), 99.
- Saridewi, D. (2015). Internet & Politik Media Sosial Dan Partisipasi Politik Masyarakat Studi Kasus Gerakan Menentang Uu Pilkada Tidak Langsung. *Jurnal Pustaka Budaya*, 2(2), 36-49.
- Sitorus, H. J., Tanoyo, M., & Irwansyah. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4 (2), 284.
- Sokid. (2023). Media Sosial Dan Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pelaksanaan Tahaan Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Susukan). *Jurnal Of Comprehensive Science*, 2 (5), 1353.
- Sudirman, L., & Antony. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice. *Jurnal Law Paulus*, 19.
- Tamara, N. (2021). *Demokrasi Di Era Digital*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Utomo, B. S., & Irwansyah, I. (2023). Peran Media Sosial Dalam Gerakan Menolak Penundaan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesia*, 8 (2), 125.
- Widayanti, C., & Nilam, Y. (2023). Analisis Pengaruh Debat Calon Presiden 2024 Pertama Terhadap Elektabilitas Calon Presiden Perspektif Pandangan Masyarakat. *Jurnal Of Social And Economics Research*, 5(2), 1721-1722.